

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia dihadapkan pada proses pembangunan yang mengalami ketimpangan antara wilayah kota dengan desa, pembangunan cenderung lebih terpusat di wilayah perkotaan sehingga wilayah pedesaan tertinggal dari segi infrastruktur, pelayanan dan distribusi sumber daya, kondisi ini menghambat tujuan dari pembangunan nasional (Arafat et al., 2025). Seharusnya desa menjadi wilayah penunjang potensi sumber daya alam berupa sektor pertanian, perkebunan, perternakan hingga sumber daya lokal. Pembangunan desa menjadi hal yang terpenting pada pembangunan nasional Indonesia, karena 80% wilayah Indonesia adalah wilayah pedesaan(Putra & Yuliarso, 2024).

Pelaksanaan otonomi desa menjadi kewenangan pemerintah desa untuk mengelola sumber daya yang terdapat di wilayah desa. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang menegaskan bahwa desa memiliki kedudukan dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Melalui kebijakan tersebut, pembangunan desa menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah desa dan masyarakat desa dalam menciptakan kemandirian desa melalui pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal.

Pemberdayaan masyarakat menjadi langkah yang strategis pada keberhasilan pembangunan desa untuk menggerakkan kapasitas masyarakat dan kelompok masyarakat dalam mengembangkan perekonomian serta potensi lokal yang

berkelanjutan (Amri et al., 2025). Pemberdayaan masyarakat diartikan bahwa usaha memandirikan daerah serta masyarakat, dengan mendorong, memberikan motivasi, serta kesadaran atas potensi wilayah untuk dapat berdaya guna dan berhasil guna (Arfiansyah et al., 2023). Potensi desa yang dapat menunjang keberhasilan pembangunan salah satunya yaitu pemanfaatan sumber daya lokal pada bidang pariwisata.

Sektor pariwisata menjadi daya unggul untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 yang menjabarkan bahwa arah kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata dengan pengembangan potensi, kapasitas, serta partisipasi masyarakat, terutama sumber daya lokal untuk pengembangan usaha produktif dan desa wisata. Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik, (2024), Indonesia memiliki 84.276 desa dengan potensi yang sangat beragam, hal ini menjadi peluang besar untuk mengembangkan desa wisata dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dan desa serta menjaga keberlanjutan dari sumberdaya alam dan budaya.

Tabel 1.1 Jumlah Desa Wisata 2024

No	Nama Provinsi	Jumlah Desa Wisata
1	Jawa Timur	603
2	Sumatera Barat	561
3	Sulawesi Selatan	537
4	Jawa Tengah	511
5	Jawa Barat	470

No	Nama Provinsi	Jumlah Desa Wisata
6	Sumatera Utara	325
7	Nusa Tenggara Barat	275
8	Sulawesi Tenggara	234
9	DI Yogyakarta	198
10	Bali	168

Sumber:Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (2024)

Berdasarkan data diatas menurut Jejaring Desa Wisata (Jadesta) Tahun 2024, tercatat sebanyak 6.155 desa wisata di Indonesia yang terbagi dari 4 kategori desa wisata. Jawa Timur menjadi Provinsi yang menduduki peringkat pertama terdiri dari kategori yaitu 461 desa wisata rintisan, 77 desa wisata berkembang, 60 desa wisata maju dan 5 desa wisata mandiri.

Banyaknya desa wisata sejalan dengan tingginya kunjungan wisatawan nusantara di Jawa Timur, menurut Badan Pusat Statistik, (2025) jumlah wisatawan mencapai 202.473.958 tahun 2023 lalu mengalami peningkatan tahun 2024 dengan total 204,882,768. Peningkatan jumlah wisatawan turut memberikan kontribusi dalam perekonomian daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Timur. Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, (2025) menunjukan pada tahun 2024 dengan menyumbang kontribusi PDRB pada sektor pariwisata sebesar 9,75 persen mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, angka ini menegaskan bahwa sektor pariwisata menjadi penggerak perekonomian, kesejahteraan masyarakat dan pembuka lapangan pekerjaan.

Situasi tersebut menunjukan bahwa sektor wisata, termasuk pemberdayaan desa wisata menjadi komitmen dari pemerintah dalam mendorong desa sebagai

wilayah pembangunan dan pemberdayaan sektor pariwisata lokal, seperti yang dijelaskan oleh Gubernur Provinsi Jawa Timur yang dimuat rri.co.id berikut:

(rri.co.id, 2024) - “Gubernur Provinsi Jawa Timur, Khofifah menyampaikan bahwa keberadaan desa wisata di Provinsi Jawa Timur menjadi penguatan perekonomian mulai dari level terkecil yang mampu membuka banyak lapangan pekerjaan sehingga meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan masyarakat desa.” (RRI.co.id - [Khofifah Takjub 12 Desa Wisata Jatim Lolos ADWI 2024](http://RRI.co.id), diakses pda Jumat 06 Februari 2026)

Pernyataan tersebut membuktikan bahwa desa wisata dapat berhasil memberikan peluang penghasilan dan kesejahteraan masyarakat apabila menempatkan keterlibatan masyarakat sebagai subjek utama dalam pengelolaan desa wisata. Selaras dengan komitmen pemerintah melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pemberdayaan Desa Wisata, bahwa dibutuhkan peran serta masyarakat dalam pemberdayaan desa wisata ini dan keterlibatan lembaga pengelola desa wisata yaitu BUMDes, Pokdarwis serta kelompok masyarakat lainnya.

Salah satu daerah di Provinsi Jawa Timur yang menempatkan prioritas pembangunan daerah melalui pemanfaatan potensi lokal dalam sektor desa wisata yaitu Kabupaten Magetan. Pernyataan tersebut dijabarkan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029 bahwa pada sektor pariwisata melakukan pengembangan dan pengelolaan bagi Desa wisata terutama pada lokasi wisata Selendang Lawu yaitu wisata alam di kecamatan Plaosan, Sidorejo dan Panekan. Berdasarkan Data Jejaring Desa Wisata (Jadesta) Tahun 2024 tercatat 28 Desa Wisata yang tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Magetan.

Adanya prioritas pembangunan sektor wisata ini tidak sejalan dengan kondisi ekonomi sosial masyarakat desa Kabupaten Magetan. Berdasarkan persentase tingkat penduduk miskin pada tahun 2022 hingga 2024 pada Kabupaten Magetan mengalami penurunan meskipun fluktuatif, dijabarkan pada tahun 2022 tercatat sebesar 9,84 persen, tahun 2023 sebesar 9,80 persen dan mencapai 9,32 persen pada tahun 2024 (Statistik, 2025). Menurut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029, meskipun terdapat penurunan penduduk miskin namun masih terdapat tantangan yaitu masyarakat pada struktur ekonomi Magetan masih sangat bergantung pada sektor pertanian tradisional yang rentan pada fluktuasi iklim dan harga komoditas. Kondisi ini menuntut optimalisasi potensi pada sektor wisata, terutama pada program pemberdayaan masyarakat desa agar mampu menciptakan peluang kerja baru untuk menyerap tenaga kerja lokal.

Program desa wisata menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan yang kemudian akan dikembangkan potensi alam, sosial dan budaya melalui pemberdayaan desa wisata pada tingkat desa yang menjadi kewenangan pemerintah desa. Kebijakan tersebut sejalan dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata (RIPPARDA) Kabupaten Magetan tahun 2015-2025 bahwa terdapat upaya pengembangan kawasan wisata perdesaan atau Desa Wisata dikelola secara mandiri melalui komitmen pemerintah desa dengan membentuk Pokdarwis dan menyertakan modalnya melalui unit wisata pada Badan Usaha Milik Desa.

Salah satu desa di Kabupaten Magetan yang menjadi bagian dari program pembangunan wisata Selendang Lawu adalah Desa Sumberdodol di Kecamatan Panekan, namun dalam pelaksanaannya Desa Sumberdodol masih menghadapi

beberapa tantangan. Kondisi Desa Sumberdodol memiliki potensi sumber daya alamnya yang melimpah berupa sumber mata air yang terbanyak di kecamatan panekan, namun potensi sumber mata air belum dapat dikelola secara optimal oleh pemerintah desa sebagai bagian dalam pembangunan desa. Berdasarkan hasil pra survei wawancara dengan Direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Desa Sumberdodol ini kaya akan air tapi belum terdapat regulasi atau peraturan desa yang mengatur terkait pengelolaan air agar dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Dibuktikan melalui hasil pra survei bahwa potensi sumber mata air ini dimanfaatkan sebagian besar masih bersifat tradisional untuk keperluan irigasi sawah dan pemenuhan kebutuhan rumah tangga bagi masyarakat. Melalui data laporan potensi desa Sumberdodol, bahwa sebagian besar aktivitas sumber daya manusia masyarakat Sumberdodol hanya berfokus pada bidang pertanian sebagai mata pencarian utama. Dalam hal ini, masyarakat desa sumberdodol tingkat kesadaran yang relatif rendah dalam mengelola potensi sumber daya alam yang dimiliki karena hanya bergantung pada bidang pertanian, yang berarti belum mampu memberikan nilai tambah ekonomi yang signifikan bagi desa.

Permasalahan lain yang terjadi, setelah dibangunnya wisata kolam renang Tirta Mudo oleh pemerintah desa, pengelolaan wisata belum memiliki sumber daya manusia yang terampil pada bidangnya. Hal ini dikarenakan belum adanya lembaga desa yaitu BUMDes maupun pokdarwis yang mewadahi serta mengorganisir masyarakat guna terlibat dalam pengelolaan wisata. Berdasarkan hasil pra survei wawancara dengan sekretaris desa Sumberdodol, pada tahun 2020 kolam renang ini mengalami kemunduran operasional karena pasifnya peran BUMDes sehingga

kolam renang ini diterapkan sistem lelang oleh pemerintah desa agar tetap ada pengelolaannya di luar dari keterlibatan masyarakat desa. Berikut dokumentasi objek wisata kolam renang tirta mudo



Gambar 1.1 Objek Wisata Kolam Renang Tirta Mudo

Sumber: Laporan Pemerintah Desa Sumberdodol, 2026

Kesadaran dan keterlibatan masyarakat serta lembaga desa yaitu BUMDes yang cenderung pasif permasalahan ini tentu menjadikan pembangunan potensi wisata desa mengalami kemunduran akibat pasca pandemi covid-19, sebagaimana kutipan berita yang dimuat radarmadiun.jawapos.com:

(radarmadiun.jawapos, 2023) - “Terdapat tujuh desa dari lima kecamatan salah satunya Desa Sumberdodol Kecamatan Panekan yang mengalami desa perintis bisnis pariwisata yang gagal berkembang dikarenakan pasca pandemi covid-19 sehingga, pengelola wisata tidak dapat pemasukan serta umkm di dalamnya juga tidak dapat berkembang sebab kekurangan sumber daya manusia yang punya komitmen untuk mengelola.” ([Sejumlah Desa Wisata di Magetan Layu sebelum Berkembang - Radar Madiun](#), diakses pada 28 Februari 2026)

Berdasarkan dari hasil pra survei wawancara sekretaris Desa Sumberdodol dan kutipan berita diatas menunjukan adanya kegagalan dalam pengelolaan wisata di Desa Sumberdodol. Tidak disebabkan oleh kurangnya potensi fisik, melainkan akibat lemahnya keterlibatan dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang

mengelola objek wisata kolam renang tirta mudo sehingga diterapkan sistem lelang selama 2 tahun.

Kondisi ini juga berdampak pada terbengkalainya area sekitar sumber mata air yang seharusnya menjadi potensi keunggulan desa justru digunakan sebagai lahan penumpukan sampah dan tanaman liar yang tidak terurus. Melihat permasalahan tersebut, pemerintah desa membuat suatu perubahan dengan mengaktifkan kembali BUMDes yang sebelum pasif untuk menggerakkan partisipasi masyarakat terutama anak muda desa untuk mengubah area sumber mata air yang tidak terawat untuk dikelola sebagai objek wisata, antara lain melalui pembangunan rakit bambu serta pembentukan bendungan yang kemudian ditebar bibit ikan koi sebagai wisata terapi ikan. Sebagaimana kutipan berita dimuat Tangsel Jawa Pos. com yaitu:

(tangsel.jawapos.com, 2025)- “Frito Tri Hendrik, Direktur BUMDes Sumberdodol, mengatakan “Penataan objek wisata ini terinspirasi dari para anak muda desa yang resah melihat penampungan sampah, Tumpukan sampah di kawasan itu lantas dibersihkan dan disulap menjadi penampungan air. Kemudian, kolam itu dijadikan tempat budidaya ikan koi yang kini menjadi daya tarik pengunjung”
<https://tangsel.jawapos.com/wisata-kuliner/2505513797/geliat-sederet-destinasi-wisata-alternatif-di-magetan-ada-nuansa-jepang-di-genilangit-sensasi-wahana-air-alam-di-sorbendo>, diakses pada Selasa 28 Oktober 2025).

Pembangunan objek wisata diinisiasi oleh kepala desa, BUMDes serta masyarakat desa khususnya anak muda tidak hanya merespon masalah lingkungannya namun juga menumbuh kembangkan umkm, edukasi serta pelestarian lingkungan untuk membangkitkan kesadaran masyarakat desa akan potensi desa. Adanya Objek wisata Sorbendo ini menjadi langkah awal dari adanya pemberdayaan pengelolaan wisata yang berkelanjutan sebab telah terlihat bentuk

keterlibatan masyarakat. Serta Seiring berjalannya waktu, potensi sumber mata air ini dikembangkan menjadi program *Smart Fisheries Village* dalam budidaya perikanan koi yang terintegrasi dengan sektor wisata salah satunya Sorbendo.



Gambar 1.2 Sebelum dan Sesudah adanya Objek Wisata Sorbendo

Sumber: Laporan Pemerintah Desa Sumberdodol, 2026

Untuk menyikapi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Magetan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Pengembangan Desa Wisata bahwasanya diperlukan upaya pemberdayaan masyarakat dalam setiap pembangunan destinasi wisata di desa wisata yang melibatkan UMKM, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), BUMDes serta kelompok masyarakat lainnya. Melalui pemberdayaan desa wisata ini diharapkan mampu mengubah kesenjangan sosial ekonomi masyarakat sehingga dapat pemeratakan kesempatan usaha dan lapangan kerja, peningkatan perekonomian serta pengurangan urbanisasi.

Adanya Perda Kabupaten Magetan mengenai pengembangan desa wisata juga diperkuat bahwa Desa Sumberdodol menjadi salah satu desa yang ditetapkan sebagai Desa Wisata di Kabupaten Magetan melalui Surat Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/300/Kept./403.013/2023 Tentang penetapan Desa Wisata

Kabupaten Magetan. Penetapan Desa Wisata Sumberdodol menjadi landasan formal bagi pemerintah desa untuk memprioritaskan pembangunan desa pada upaya pemberdayaan pengelolaan desa wisata yang telah dijabarkan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sumberdodol Tahun 2020-2028. Dalam hal ini menurut Marzellina & Amalia, (2022) Desa wisata Sumberdodol termasuk pada pemberdayaan secara *Buttom-Up* yang diartikan bahwa terbentuk dan berkembang atas dasar inisiatif pemerintah desa bersama masyarakat desa dalam mengoptimalkan potensi alam, buatan, maupun budaya yang dimiliki sehingga memunculkan ide-ide dari masyarakat desa.

Pemerintah Desa Sumberdodol menjadikan suatu peluang wisata untuk dikembangkan secara berkelanjutan yang mampu meningkatkan kualitas desa pada bidang ekonomi, sosial dan Budaya. Pemerintah Desa Sumberdodol memberikan kewenangan untuk memberdayakan masyarakat desa melalui pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) serta pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Bentuk pemberdayaan lainnya yang dilakukan oleh pemerintah desa yaitu sosialisasi dan edukasi masyarakat terkait potensi wisata yang dikembangkan, pelatihan peningkatan sdm pariwisata, membuat kebijakan penyediaan kios-kios umkm untuk masyarakat bersama BUMDes serta pemberdayaan melalui BUMDes Tirta Karya Mandiri dan Pokdarwis Sumber Bening.

Melalui Peraturan Desa Sumberdodol Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tirta Karya Mandiri, bahwa BUMDes berperan dalam pengelolaan desa wisata hal ini karena kedua objek wisata yang di Desa Sumberdodol termasuk kedalam unit usaha BUMDes.

BUMDes mewadahi masyarakat melalui operasional wisata yaitu menjaga tiket masuk, menjaga wahana air, menjaga dan menyediakan lahan parkir serta penyediaan kios-kios bagi masyarakat untuk menumbuhkan potensinya pada bidang UMKM.

Selain dari BUMDes, pemberdayaan pada pengelolaan desa wisata tentu tidak terlepas dari keterlibatan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang dibentuk pemerintah desa melalui Surat Keputusan Kepala Desa Sumberdodol Nomor 188/11/Kept./403.408.8/2023 tentang pembentukan Pokdarwis Sumber Bening. Bahwasanya Pokdarwis menjadi komponen keterlibatan masyarakat dalam pencetus ide kreatif dan inovasi sehingga desa wisata dapat berkembang (Salsabila & Puspitasari, 2023). Pokdarwis Sumber Bening mewadahi masyarakat dalam pelayanan paket wisata sekaligus pembinaan masyarakat pemilik homestay dan mewadahi UMKM unggulan Desa Sumberdodol yaitu Nori Jrembak yang diinisiasi oleh PKK untuk ikut serta dalam paket wisata.

Setelah ditetapkan sebagai bagian dari Desa Wisata yang ada di Kabupaten Magetan, Desa Wisata Sumberdodol hingga saat ini masih tergolong pada kategori desa rintisan, bahwa masih dalam tahap pengelolaan yang dilakukan oleh lokal desa, jumlah wisatawan yang berkunjung masih terbatas dan kesadaran masyarakat belum tumbuh sepenuhnya. Meskipun demikian, Desa Wisata Sumberdodol telah mendapatkan berbagai pencapaian dan penghargaan yang masuk dalam daftar 500 besar di ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) pada tahun 2023 dan 2024. Desa tersebut juga berhasil meraih peringkat 10 besar urutan ke-7 dari 106 desa di seluruh Indonesia pada ajang Program Desa

BRiliAn 2025, ajang ini merupakan program pemberdayaan desa. Hal tersebut terlihat dari kondisi jumlah pengunjung desa wisata Sumberdodol

Tabel 1. 2 Jumlah Pengunjung Dua Objek Wisata Desa Sumberdodol

Tahun Kunjungan Wisata	Jumlah Pengunjung di Objek Sorbendo	Jumlah Pengunjung di Objek Kolam Renang Tirta Mudo	Total Pengunjung
2023	7.132	8.900	16.032
2024	12.821	5.200	18.021

Sumber: BUMDesa Tirta Karya Mandiri (2025)

Berdasarkan tabel tersebut, jumlah pengunjung pada wisata Sorbendo mengalami peningkatan pada tahun 2024. Peningkatan ini karena statusnya sebagai destinasi wisata yang relatif baru sehingga lebih di minati oleh wisatawan. Sebaliknya, kunjungan wisatawan di Kolam Renang Tirta Mudo mengalami penurunan pada tahun 2024 dikarenakan faktor pergeseran wisatawan yang lebih mencoba destinasi baru yaitu wisata Sorbendo. Meskipun Desa Wisata Sumberdodol meraih berbagai pencapaian, jumlah kunjungan wisata masih mengalami fluktuasi sehingga belum terlihat kemandirian masyarakat untuk berinovasi dalam mengelola wisata.

Oleh karena itu, di perlukan perhatian yang optimal pada setiap proses pemberdayaan untuk tercapainya tujuan kemandirian dan keberlanjutan pengelolaan desa wisata. Proses pemberdayaan dalam pengelolaan desa wisata mencakup pada beberapa lingkup didalam pemberdayaan, menurut Mardikanto & Soebianto, (2019) Pemberdayaan dikelompokkan menjadi 4 dimensi yaitu bina manusia, bina usaha, bina lembaga dan bina lingkungan.

Setelah adanya pemberdayaan itu dijalankan, pada lingkup bina manusia bahwa upaya yang dilakukan untuk memperbaiki mutu hidup dan kesejahteraan melalui pengembangan kapasitas masyarakat namun realitanya dari segi keterlibatan masyarakat dalam mengelola wisata yang ada di Desa Sumberdodol cenderung belum menunjukkan perubahan yang signifikan dari segi kapasitas SDM masyarakat. Meskipun, adanya potensi desa wisata ini menjadi pembuka lapangan pekerjaan sampingan bagi sebagian masyarakat yaitu terdapat 5 bagian operasional layanan wisata, 15 umkm yang dibina dan disediakan penyewaan kios kios, 5 pengelola pemilik homestay serta 13 anggota pokdarwis didalam pengelola pemasaran paket wisata. Namun masyarakat merasa jika terlibat dalam pengelolaan wisata tidak mendapatkan hasil yang signifikan dalam waktu singkat dan lebih menguntungkan pada sektor pertanian. Berikut pernyataan dari Sekretaris Desa Sumberdodol:

“Masyarakat Sumberdodol ini memang mayoritas sektor pertanian dan banyak yang sepuh, ketika ada sosialisasi untuk ikut terlibat pada pengelolaan wisata yang tentunya membutuhkan proses itu mereka cenderung tidak percaya kalau belum kelihatan hasilnya, mereka lebih berfokus hanya pada perekonomian yang instan saja” (Wawancara Pra Penelitian, 9 Oktober 2025).

Kondisi menunjukan adanya potensi desa wisata belum sepenuhnya menumbuhkan kesadaran, kepercayaan dan keterlibatan aktif masyarakatnya untuk mengelola wisata meskipun dari pemerintah desa telah melakukan sosialisasi bersama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Magetan. Berdasarkan informasi yang didapat melalui pra survei oleh direktur BUMDes Tirta Karya Mandiri sebagai berikut:

“Untuk pelatihan sendiri dari BUMDes maupun pokdarwis biasanya menggandeng dari pihak luar seperti dinas pariwisata maupun dinas

pemberdayaan berupa peningkatan kapasitas SDM wisata itupun tidak semua bisa ikut hanya perwakilan saja, lalu pelatihan uji test paket wisata diikuti oleh pokdarwis, masyarakat dibawah naungan BUMDes juga pernah mengikuti program desa brilian yang diadakan oleh Bank BRI mengenai pelatihan pengelolaan wisata, lalu untuk pengelolaan homestay ada pernah pelatihan yang diadakan dinas pariwisata mengenai penataan kamar homestay, perwakilan masyarakat juga pernah mengikuti event bursa pariwisata dan festival dewi cemara, untuk yang rutin kita melakukan pembinaan kepada para UMKM terkait inovasi menu, operasional layanan wisata. Untuk pelatihan rutin terkait dari kita belum ada mbak” (Wawancara pra penelitian 9 Oktober 2025)

Penyelenggaraan pelatihan bagi masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan wisata merupakan hal yang sangat penting, tidak hanya untuk mendorong kemandirian, namun juga untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam menghadapi tantangan perkembangan desa wisata. Tanpa adanya pelatihan tersebut, kapasitas sumber daya manusia masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan wisata masih belum memiliki kompetensi yang memadai di bidang pariwisata. Menurut Pina et al., (2023) bahwasanya ketidaberdayaan masyarakat dalam berpartisipasi ini salah satunya karena terbatasnya kemampuan dan keterampilan yang dimiliki pada bidang wisata.

Pemberdayaan pada lingkup bina usaha dilakukan upaya dalam memberikan manfaat kepada masyarakat terutama pada segi perekonomian. Realita dilapangan bahwa adanya potensi desa wisata dapat menumbuhkan perekonomian terutama pada ibu-ibu rumah tangga maupun masyarakat yang masih menganggur untuk berjualan melalui penempatan kios kios UMKM yang disewakan. Pemberdayaan ini memberikan keuntungan dalam pembuka lapangan pekerjaan, sebagaimana kutipan yang dimuat oleh harianlenteraindonesia.co.id yaitu:

(harianlenteraindonesia.co.id, 2023)- “Indri, selaku penjaga stand kuliner di Sorbendo, mengatakan bahwa keberadaan wisata Sorbendo dapat mampu

memajukan perekonomian warga sekitar. Indri yang menjadi ibu rumah tangga sekarang mampu membantu perekonomian keluarga dengan usaha di wisata ini yang dikoordinir oleh Bumdes Tirta Karya Mandiri desa Sumberdodol”.

(Sumber: <https://harianlenteraindonesia.co.id/2023/07/26/destinasi-wisata-sorbendo-desasumberdodol-kecamatan-panekan-kabupaten-magetan/>, diakses pada 22 November 2025).

Berdasarkan pernyataan diatas, pemberdayaan menjadikan masyarakat yang sebelumnya pengangguran dapat memperbaiki perekonomiannya secara mandiri melalui pengelolaan potensi yang tersedia.

Terdapat hambatan pemberdayaan dalam segi pemberian pembinaan maupun pelatihan inovasi produk usaha maupun pemasaran bagi para masyarakat yang membuka lapangan usaha UMKM belum terdapat program rutin pelatihan. Selain itu pada Pokdarwis Sumber Bening melakukan pembuatan dan pemasaran paket wisata dengan membina pemilik *Homestay* untuk ikut terlibat pada pemasaran paket wisata. Namun, berdasarkan hasil pra survei wawancara dengan anggota pokdarwis bahwa inovasi paket wisata ini belum memberikan dampak perekonomian bagi desa dan masyarakat yang terlibat karena produk paket wisata kurang diminati sehingga bergantung pada permintaan paket wisata yang tidak menentu.

Adanya pemberdayaan pada lingkup usaha ini tidak hanya meningkatkan kemandirian ekonomi dan keterlibatan masyarakat namun juga berkontribusi terhadap pendapatan asli desa, bahwa ketika suatu potensi wisata dikelola dengan optimal maka wisata tersebut juga berkembang sehingga memberikan dampak positif bagi desa. Berikut data kontribusi pendapatan asli desa yang bersumber pada usaha BUMDes salah satunya usaha wisata:

Tabel 1. 3 Data APBDes Sumberdodol Kontribusi Usaha Desa

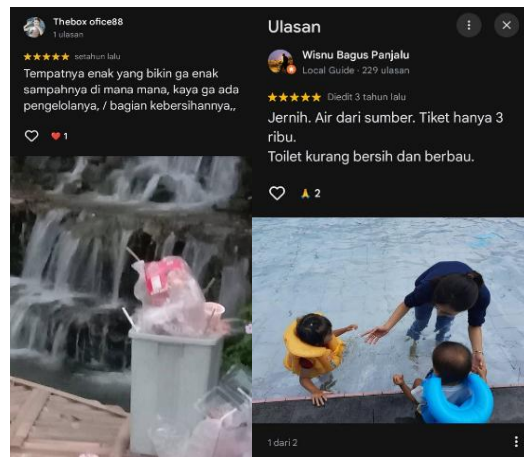
No	APBDes yang bersumber hasil usaha desa	Tahun
1.	Rp 123.000.000,00	2023
2.	Rp 123.000.000,00	2024
3.	Rp 123.000.000,00	2025

Sumber: APBDes Pemerintah Desa Sumberdodol,2025

Berdasarkan data diatas menunjukan keberadaan desa wisata Sumberdodol pada kontribusi ekonomi desa masih mengalami stagnansi pendapatan desa dari tahun 2023-2025 belum terdapat peningkatan yang signifikan. Kondisi ini mengindikasikan adanya pemberdayaan belum sepenuhnya berdampak optimal pada kemandirian desa.

Pemberdayaan pada bina lingkungan bahwa dilakukan upaya memperhatikan kondisi lingkungan wisata Sumberdodol juga menjadi kunci utama wisata tersebut dapat berkembang dan berkelanjutan. Berbeda dengan realita dilapangan, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Andini et al., (2024) menunjukan bahwa kondisi lingkungan pada lahan parkir wisata masih gersang tanpa adanya tanaman penghijauan sehingga tidak adanya tempat berteduh pada area parkir wisata. Kondisi ini juga pada Wisata Sorbendo masih menghadapi persoalan kebersihan berupa banyak sampah plastik yang berserakan hingga penumpukan sampah yang menyebabkan bau tidak sedap.

Kurangnya pemeliharaan fasilitas di Kolam Renang Tirto Mudo yang menjadi salah satu penyebab menurunnya jumlah wisatawan. Hal ini didukung adanya ulasan ulasan negatif masyarakat pada *Google Review* yang menyatakan ketidaknyamanannya dalam menikmati wisata di Sumberdodol.



Gambar 1.3 Ulasan Google Review

Sumber: Google Review (Diakses 17 Oktober 2025 melalui https://goo.gl/maps/PYPrA2iDs7BoGjWL6?g_st=aw)

Berdasarkan gambar diatas, bahwa di area objek wisata Sorbendo masih terdapat sampah berserakan sedangkan di area objek wisata kolam renang Tirta Mudo dari segi pengelolaan fasilitas masih belum dapat menjaga kebersihan lingkungan wisata.

Keterlibatan dan kesadaran masyarakat yang dijalankan dalam menjaga dan pemeliharaan lingkungan wisata masih sebatas pembinaan manajemen wisata terhadap masyarakat pengelola operasional unit wisata namun belum terdapat program Pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah desa bersama BUMDes dan Pokdarwis pemeliharaan lingkungan wisata sekaligus penjagaan kebersihan lingkungan wisata setiap harinya. Oleh karena itu, pemberdayaan belum menunjukkan aspek Sapta Pesona yang menjadi kunci dari desa wisata berkelanjutan.

Bina Kelembagaan juga menjadi lingkup penting untuk menunjang pemberdayaan didalam pembentukan lembaga lembaga masyarakat yang berfungsi secara efektif. Pemberdayaan pada pengelolaan desa wisata Sumberdodol telah

terdapat lembaga pemerintah desa sebagai regulator, fasilitator dan dinamistator mengaktifkan kembali BUMDes Tirta Karya Mandiri sebagai lembaga pemberdayaan ekonomi yang memiliki beberapa unit usaha salah satunya unit wisata desa, bersama dengan didirikannya pokdarwis Sumber Bening sehingga kedua lembaga dan organisasi tersebut mewadahi masyarakat Sumberdodol untuk ikut terlibat. Akan tetapi, realita di lapangan menunjukkan bahwa adanya ketimpangan peran antar individu dalam menjalankan pemberdayaan pada satu kelembagaan.

Berdasarkan kondisi tersebut, terlihat adanya kesenjangan antara idealnya pemberdayaan dalam mengembangkan dan mengelola desa wisata dengan realita pemberdayaan yang dilakukan di Desa Wisata Sumberdodol. Secara kebijakan, desa wisata seharusnya dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat, dapat mendorong UMKM yang khas, menjaga dan melestarikan lingkungan wisata serta memperkuat kelembagaan dan tata kelola. Realita yang ada meskipun Desa Wisata Sumberdodol telah mendapatkan berbagai penghargaan namun dari segi pemberdayaan, keterlibatan dan partisipasi SDM masyarakat yang terbatas, penguatan perekonomian melalui usaha yang ada di wisata belum berkembang, kurangnya kesadaran pelestarian lingkungan serta ketimpangan antara lembaga dan kelompok yang mewadahi masyarakat.

Penelitian sebelumnya oleh Andini et al., (2024) menunjukkan bahwa program penghijauan pada pengembangan Desa Wisata Sumberdodol telah berjalan dengan baik dalam proses penanaman pohon di area lapangan parkir yang dilakukan bersama pihak Universitas Sebelas Maret dengan Pemerintah Desa. Namun

penelitian tersebut hanya berfokus pada pengembangan penghijauan wisata belum mengkaji secara mendalam proses pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam mengelola desa wisata. Sedangkan penelitian terdahulu Rudi & Galih, (2025) yang telah melakukan penelitian di kabupaten yang sama, memberikan hasil bahwa pemberdayaan yang dilakukan belum terdapat peran pemberdaya dari pemerintah desa serta hasil analisis masih sebatas pengelolaan fisik wisata belum menganalisis keseluruhan bagaimana proses pemberdayaan masyarakat itu dijalankan. Berbeda dengan penelitian oleh Anastasya & Mulyana, (2024) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat tinggi namun belum terdapat program pengembangan sumber daya manusia yang spesifik dan pemberdayaan di Desa Wisata Sade hanya dilakukan oleh Dinas Pariwisata.

Berdasarkan ketiga penelitian tersebut umumnya hanya berfokus pada satu program saja yaitu penghijauan selain itu pemberdayaan yang dijalankan hanya oleh satu lembaga pengelola tunggal seperti BUMDes atau Dinas Pariwisata. Sehingga belum banyak mengkaji terkait proses pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah desa bersama BUMDes dan Pokdarwis melalui empat upaya pemberdayaan. Penelitian ini juga menghadirkan pada konteks yang berbeda dengan penelitian sebelumnya dilokasi yang sama, dengan menganalisis secara menyeluruh proses pemberdayaan pada dua objek wisata yaitu Sorbendo dan Kolam Renang Tirto Mudo dalam satu desa dengan dinamika pengelolaan yang berbeda. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul **“Pemberdayaan Masyarakat oleh Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Desa Wisata Sumberdodol Kabupaten Magetan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana Proses Pemberdayaan Masyarakat Oleh Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Desa Wisata Sumberdodol Kabupaten Magetan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis dan mendeskripsikan tentang proses pemberdayaan masyarakat oleh Pemerintah Desa dalam pengelolaan Desa Wisata Sumberdodol Kabupaten Magetan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan ilmu pengetahuan dan pemahaman, khususnya dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan desa wisata serta menjadi sumber referensi bagi peneliti selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menambah wawasan, pengetahuan serta pengalaman dengan menganalisis mengenai Pemberdayaan Masyarakat Oleh Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Desa Wisata Sumberdodol. Penelitian ini juga menjadi sarana untuk

mengaplikasikan teori teori yang telah didapatkan selama masa perkuliahan

b. Bagi Desa Wisata Sumberdodol

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan sumber informasi bagi pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat untuk pengelolaan potensi Desa Wisata secara berkelanjutan.

c. Bagi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

Diharapkan dengan penelitian ini mampu menambah referensi di perpustakaan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur khususnya Fakultas Ilmu Sosial, Budaya, dan Politik Program Studi Administrasi Publik dan sebagai bahan literatur untuk acuan peneliti lain yang ingin mengembangkan studi serupa di masa mendatang.